



MENGERAKKAN KEMAJUAN PERHUTANAN SOSIAL DI TANAH PAPUA: Langkah Penting Menuju Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial

ARTIKEL LAINNYA

LPHD DI DISTRIK SEREMUK KABUPATEN SORONG SELATAN
Susun Rencana Kelola Perhutanan Sosial

PEMBEKALAN BAGI FASILITATOR PELAKSANA KEGIATAN di kampung-kampung dukungan di Tanah Papua

PEMROV KALIMANTAN BARAT KONSULTASIKAN RENCANA PROPOSAL PENDANAAN IKLIM dari *Green Climate Fund* dengan Masyarakat Adat

KOORDINASI TINGKAT NASIONAL BAHAS USULAN PENDANAAN IKLIM KALIMANTAN BARAT dari *Green Climate Fund*

Editorial

Newsletter FORCLIME edisi bulan Agustus 2023 ini menampilkan catatan pendampingan pelaksanaan program perhutanan sosial di kampung dukungan di Tanah Papua, yaitu: Babrongko, Dosai, Tablasupa (Provinsi Papua); Wasur dan Yanggandur (Provinsi Papua Selatan – sebelumnya termasuk Provinsi Papua); Haha, Wendi, Emaus, Bikar (Provinsi Papua Barat Daya – sebelumnya masuk dalam Provinsi Papua Barat). FORCLIME bersama mitra kerja di masing-masing provinsi wilayah kerja berkoordinasi menyusun rencana kerja untuk mendukung pelaksanaan program nasional Perhutanan Sosial.

Seperti diketahui, pemerintah telah menargetkan alokasi seluas 12,7 juta hektare untuk pelaksanaan program perhutanan sosial. Yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Melalui program perhutanan sosial ini, pemerintah membuka kesempatan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan hutannya sehingga dapat mengolah dan mengambil manfaat seraya menjaga kelestarian hutan.

FORCLIME memasukkan kegiatan-kegiatan dalam rencana kerjanya dalam rangka pelaksanaan program Perhutanan Sosial di wilayah kerja di Tanah Papua. Rencana kerja tersebut disusun bersama mitra di lapangan, seperti Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup di Provinsi Papua, Dinas

Kehutanan Provinsi Papua Barat, serta Kesatuan Pengelolaan Hutan di Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Tambrauw yang saat ini telah menjadi bagian dari Provinsi Papua Barat Daya. Berbagai kegiatan pelatihan diberikan termasuk penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS). Kepada kelompok tani hutan di kampung-kampung dukungan pelatihan diberikan terkait kelembagaan, selain, dalam rangka meningkatkan pendapatan mereka serta meningkatkan nilai hasil hutan bukan kayu yang selama ini dikelola secara tradisional. Dengan tujuan utama dari pendampingan tersebut adalah menjaga kelestarian hutan.

Dalam proses pendampingan kepada kelompok tani hutan, FORCLIME menyediakan fasilitator yang telah mendapatkan pembekalan sebelum diterjunkan ke kampung-kampung dukungan. Dalam pelatihan tersebut, para fasilitator kampung secara khusus mendapatkan materi tentang teknik pendampingan kelompok tani hutan khususnya tiga pilar Perhutanan Sosial: Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha.

Edisi ini juga menyampaikan perkembangan dari Provinsi Kalimantan Barat yang saat ini sedang dalam proses menyusun proposal pendanaan iklim dari Green Climate Fund. Berbagai pertemuan telah dilakukan termasuk konsultasi dan koordinasi di tingkat nasional dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta koordinasi dan sosialisasi dengan masyarakat adat yang ada di wilayah terkait dengan proposal tersebut.

Mohammad Sidiq
Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Tanah Papua

Menggerakkan Kemajuan Perhutanan Sosial di Tanah Papua: Langkah Penting Menuju Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial

Catatan Pendampingan Pelaksanaan Program Perhutanan Sosial di Kampung Dukungan di Tanah Papua

Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Tanah Papua

MEMANFAATKAN KEKUATAN PERHUTANAN SOSIAL: SEBUAH PROGRAM NASIONAL

Indonesia memiliki 81,616 desa (BPS), dengan sekitar 31,86% atau 25,863 di antaranya berlokasi di kawasan hutan (data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Di antara masyarakat ini adalah 9.2 juta keluarga yang menggantungkan kehidupan mereka pada hutan. Memahami pentingnya menjaga kelestarian hutan sambil mempromosikan kesejahteraan sosial, Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), telah mampu memberikan legalitas bagi masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan hutan melalui Program Perhutanan Sosial. Program ini, yang menargetkan 12,7 juta hektare lahan hutan, bertujuan untuk mendorong pemerataan ekonomi masyarakat. Dengan partisipasi aktif masyarakat dalam program ini, harapannya adalah kawasan hutan akan memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat sambil menjaga keseimbangan ekologi yang esensial.





Perhutanan Sosial, seperti yang didefinisikan dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. 9 tahun 2021, adalah pendekatan pengelolaan hutan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat lokal dan adat sebagai aktor utama dalam memupuk kesejahteraan mereka sendiri, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya.

Melalui program ini, masyarakat di sekitar hutan diberi kesempatan untuk mengajukan hak pengelolaan hutan kepada pemerintah. Terdapat lima skema dalam Program Perhutanan Sosial, meliputi hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan. Semua skema ini memiliki peraturan dan prosedur tentang bagaimana masyarakat dapat mengajukan hak pengelolaan hutan, dan merupakan bagian penting dari upaya Indonesia untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

2



Pelatihan pembuatan madu di Kampung Wendi

	Hutan Desa	Hutan Kemasyarakatan	Hutan Tanaman Rakyat	Hutan Kemitraan	Hutan Adat
Lokasi dan status kawasan 	Hutan negara: a. Kawasan Hutan Lindung dan/Kawasan Hutan Produksi yang belum dibebani Perizinan b. Hutan lindung yang dikelola oleh perusahaan hutan negara Perum Perhutani	Hutan negara: a. Hutan produksi dan/atau Hutan Lindung dan/Hutan Produksi yang belum dibebani perizinan b. Hutan lindung yang dikelola oleh perusahaan hutan negara Perum Perhutani c. Daerah tertentu di KPH	Hutan negara; a. Kawasan Hutan Produksi yang belum dibebani Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial b. Daerah tertentu dalam KPH	1. Kawasan Hutan Produksi dan atau Hutan Lindung yang telah dibebani Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan 2. Kawasan Hutan Produksi dan/Hutan Lindung yang telah dibebani Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan 3. Kawasan Konservasi	SYARAT PENETAPAN HUTAN ADAT •Data Objek: Kejelasan terkait wilayah adat yang sudah diakui oleh Perda setempat, serta wilayah tersebut sudah bebas dari konflik •Data Subjek: Kejelasan terkait Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang telah diakui dan dilindungi dengan peraturan daerah kabupaten/kota setempat •Produk Hukum: Dasar Hukum Pengakuan bahwa Masyarakat Adat tersebut sudah ditetapkan dengan Perda/SK Bupati maupun Walikota, Perda/SK tersebut terlampir peta wilayah Adat MHA yang dimaksud •Dukungan Pemda: Jika tidak diakuiinya MHA dan Wilayah Adat oleh Pemda, maka proses tidak dapat dilanjutkan. Dukungan Pemda jelas menjadi kunci dalam proses penetapan Hutan Adat
Pemanfaatan 	Pemanfaatan hasil hutan kayu hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, sesuai dengan fungsi hutan (produksi dan lindung)	Pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, sesuai dengan fungsi hutan (produksi, dilindungi, konservasi)	Pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, sesuai dengan fungsi hutan (produksi, dilindungi, konservasi)	Pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, sesuai dengan fungsi hutan (produksi dan lindung)	
Durasi Ijin 	35 tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan perhutanan sosial	35 tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan perhutanan sosial	35 tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan perhutanan sosial	Sesuai dengan Perjanjian individual	
Lembaga Pengelola 	Lembaga Desa, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa	1. Perseorangan yang tergabung/membentuk kelompok masyarakat 2. Kelompok Tani Hutan/Gabungan Kelompok Tani 3. Koperasi yang bergerak di bidang pertanian, hortikultura dan/kehutanan	1. Kelompok Tani Hutan 2. Gabungan Kelompok Tani Hutan 3. Koperasi Tani Hutan 4. Profesional kehutanan	Pemegang perizinan: 1. Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Kawasan Hutan 2. Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Pengelola kawasan konservasi: 1. UPT BKSDA 2. UPT Taman Nasional Mitra: 1. Kelompok masyarakat 2. Profesional kehutanan	

Sumber: Balai PSKL Wilayah Maluku Papua (PERMENLHK Nomor 9 Tahun 2021)

Dalam upaya mempercepat pelaksanaan program Perhutanan Sosial, pada awal tahun 2022, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) menyusun rancangan Peraturan Presiden. Rancangan ini kemudian diterbitkan sebagai Perpres No. 28 tahun 2023 mengenai Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial pada tanggal 30 Mei 2023. Dengan adanya Perpres ini, semua pihak yang terlibat memiliki panduan yang jelas untuk melaksanakan pembangunan perhutanan sosial. Ini adalah bagian penting dari pembangunan wilayah dan mewujudkan masyarakat sejahtera yang berbasis pada pengelolaan hutan yang lestari.

PS DAN PERAN PIVOTALNYA DALAM KERANGKA KPH

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) bertindak sebagai dasar penting dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Dalam bersinergi dengan Perhutanan Sosial, KPH membantu mendorong tata kelola hutan yang kuat, mitigasi terhadap perubahan iklim, pelestarian

keanekaragaman hayati, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar hutan. KPH beroperasi di dalam hutan dengan batas-batas yang ditetapkan secara jelas, dan memberikan layanan publik yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan.

Perhutanan Sosial berperan pivotal dalam pekerjaan KPH, yang memiliki tanggung jawab dalam mengoordinasikan perencanaan kegiatan Perhutanan Sosial, termasuk dengan pemegang Perizinan Berusaha. Selain itu, KPH juga mendampingi dan membimbing kelompok-kelompok tani hutan dalam pelaksanaan aktivitas Perhutanan Sosial, berusaha memfasilitasi proses ini agar dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan yang optimal. KPH berkontribusi dalam upaya pengurangan ketimpangan, sebagaimana ditargetkan oleh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), melalui fasilitasi dan peningkatan kualitas pendampingan Perhutanan Sosial.

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) bertindak sebagai dasar penting dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Dalam bersinergi dengan Perhutanan Sosial, KPH membantu mendorong tata kelola hutan yang kuat, mitigasi terhadap perubahan iklim, pelestarian keanekaragaman hayati, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar hutan.

ADA BEBERAPA PERAN PIVOTAL LAIN DARI PERHUTANAN SOSIAL (PS) DALAM KONTEKS KPH:



Pembangunan Masyarakat: PS memberdayakan masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan. Melalui pendekatan ini, KPH membantu dalam membangun dan memperkuat kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan.



Pelestarian Ekosistem: PS mempromosikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan praktik perlindungan alam, yang bertujuan untuk melestarikan ekosistem dan keanekaragaman hayati.



Mitigasi Perubahan Iklim: Melalui PS, KPH berperan dalam mitigasi perubahan iklim. Hal ini dicapai melalui pelestarian hutan dan penyerapan karbon.



Peningkatan Ekonomi Lokal: PS juga dapat berperan dalam meningkatkan ekonomi lokal melalui peningkatan mata pencaharian berkelanjutan, seperti hasil hutan bukan kayu (HHBK), jasa lingkungan, dan ekowisata.



Peningkatan Hak dan Keterlibatan Masyarakat Adat: Melalui PS, KPH memastikan pengakuan dan perlindungan hak serta peningkatan partisipasi masyarakat adat dalam pengelolaan hutan.



PERAN STRATEGIS FORCLIME DALAM Mendukung PEMBERDAYAAN PERHUTANAN SOSIAL

Dalam upaya menciptakan pengelolaan hutan lestari, FORCLIME mendukung Pemerintah Indonesia dalam mendorong perhutanan sosial di Indonesia. Sebagai inisiatif yang selaras dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. 9 tahun 2021, FORCLIME bergerak dalam proses awal pada skema perhutanan sosial, membantu masyarakat menemukan skema yang paling cocok dan menentukan langkah-langkah implementasi yang sesuai berdasarkan kondisi dan kebutuhan setempat. Dalam kerangka Perhutanan Sosial, FORCLIME juga mendukung proses percepatan pembangunan hutan adat dan peningkatan kemampuan kelompok pengguna sistem pengelolaan hutan (termasuk masyarakat adat).

Pada tingkat nasional, FORCLIME mendukung Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) dalam melakukan kajian percepatan perhutanan sosial. Ini dilakukan melalui penyusunan dokumen akademik yang kemudian dimantapkan menjadi Peraturan Presiden No 28 tahun 2023. Adanya regulasi ini diharapkan dapat memberikan dorongan yang lebih besar dari kementerian/lembaga terkait untuk memajukan perhutanan sosial.

Pada tingkat nasional dan subnasional, FORCLIME mendukung upaya yang dilakukan KPH dan BPSKL untuk mempromosikan pengembangan kapasitas SDM dengan niat untuk mendukung pengelolaan hutan lestari agar memberi kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini juga membantu upaya dalam mengurangi emisi gas rumah kaca di sektor kehutanan. Salah satu bagian penting dari upaya ini adalah program pengembangan kapasitas dimana pelatihan

dikembangkan terkait dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Perhutanan Sosial.

Kontribusi penting FORCLIME adalah memberikan bantuan teknis untuk mewujudkan keberhasilan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Ini dicapai melalui peningkatan kapasitas lembaga dan kemampuan SDM dari kelompok-kelompok tani hutan melalui berbagai pelatihan. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek mulai dari administratif dan manajerial hingga aspek teknis seperti pemetaan partisipatif dan training untuk fasilitator. Pelatihan juga mencakup keterampilan penilaian dan pencatatan kuantitas serta kualitas sumber daya hutan — terutama hasil hutan bukan kayu yang memiliki potensi tinggi seperti madu, minyak kayu putih, teh sarang semut, teh daun gaharu, dan minyak lawang. Pelatihan ini secara khusus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan spesifik kelompok tani hutan, tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan perbaikan mata pencahariannya.

FORCLIME mendukung kegiatan terkait perhutanan sosial di kampung-kampung binaan seperti Babrongko, Dosai, Tablasupa di Papua, Wasur dan Yanggandur di Papua Selatan, serta Haha, Wendi, Emaus, dan Bikar di Papua Barat Daya. Dalam pelaksanaannya, FORCLIME berkolaborasi dengan mitra di daerah termasuk Dinas Kehutanan/KPH Papua dan Papua Barat Daya, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua dan Papua Barat, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Seksi Wilayah II Sorong dan III Jayapura, dan Balai Taman Nasional Wasur di Merauke, Papua Selatan.

DUKUNGAN FORCLIME DI PAPUA BARAT

FORCLIME Mendukung Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial di Provinsi Papua Barat

Di Provinsi Papua Barat, Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) mendapatkan dukungan besar dari mitra-mitra pembangunan, salah satunya dukungan dari FORCLIME. Bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Papua Barat, FORCLIME memainkan peran penting dengan memfasilitasi Pokja PPS Papua Barat. Kegiatan utama yang difasilitasi oleh FORCLIME mencakup pembaharuan struktur Pokja, penyusunan *roadmap* PS, dialog program PS dan penguatan peran masyarakat adat dalam pengelolaan hutan dan pembangunan ekonomi, serta pemberdayaan kelompok masyarakat dan pengembangan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) di kampung binaan.

Pada Agustus 2021, selama pandemi COVID-19, Dinas Kehutanan Papua Barat mengaktifkan kembali Pokja PPS Papua Barat melalui pertemuan daring untuk membahas perhutanan sosial. Pertemuan pada tanggal 10 Desember 2021 menjadi tonggak sejarah penting dalam perkembangan Pokja PPS, di mana FORCLIME resmi bergabung sebagai anggota Pokja PPS Papua Barat.

Pada awal tahun 2022, FORCLIME memfasilitasi penyusunan program kerja Pokja PPS sesuai regulasi Menteri LHK No. 09/2021. Dukungan berlanjut pada pertemuan Agustus 2022 untuk mengoordinasikan perkembangan perhutanan sosial dan mendapatkan dukungan dari Mitra Pembangunan Papua Barat. Hingga kini, telah diterbitkan 73 izin hutan desa dan 9 izin hutan kemasyarakatan di Papua Barat. Masalah mendesak terkait ketersediaan tenaga pendamping dan upaya monumental untuk meningkatkan kapasitas mereka menjadi topik pembahasan yang menonjol.

DUKUNGAN FORCLIME DI PAPUA

FORCLIME Mendukung DKLH Papua dan BPSKL Seksi Wilayah III Jayapura untuk Program PS di Provinsi Papua

Untuk memberikan vitalitas baru pada Pokja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) di Papua, kolaborasi telah diinisiasi. FORCLIME, diberi sambutan sangat baik untuk bekerja sama dengan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Papua dan BPSKL Wilayah III Jayapura, melibatkan diri dalam penguatan dan aktivasi kembali Pokja PPS Papua yang sempat vakum. Upaya membentuk kembali struktur pengurus Pokja menjadi langkah kunci. Inisiatif strategis ini berlangsung sejak 2022, di mana pada saat itu diskusi terus berkembang terhadap implementasi PS di Papua. Kegiatan utama melibatkan serangkaian rapat koordinasi untuk pembentukan kembali Pokja serta perumusan langkah strategis mensosialisasikan skema-skema PS yang tepat. Selanjutnya, dukungan penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS), terutama untuk skema Hutan Desa dan Hutan Adat, pun menjadi fokus penuh. Ini adalah sebuah perjalanan transformasi menggairahkan dalam mendukung PS di Papua.

Merujuk pada perkembangan terkini, beragam kemajuan telah tampak dalam rangka mendorong kampung-kampung binaan FORCLIME untuk berpartisipasi dalam skema PS. Salah satu kampung yang mendapatkan sorotan spesifik adalah Kampung Babrongko, Kabupaten Jayapura. Meski pada tahun 2022 sempat menghadapi tantangan terkait verifikasi awal untuk usulan Hutan Adat, yang belum berakhir dengan persetujuan dari Menteri, semangat dan upaya ini tidak berakhir di sana. BPSKL telah berkomitmen untuk terus memfasilitasi proses tersebut. Melalui pelaksanaan anjuran dari hasil verifikasi awal oleh tim verifikasi PSKL KLHK, optimisme terhadap keberhasilan skema ini di Kampung Babrongko tetap kuat dan menyal.

Pada tanggal 8-9 Agustus 2022, FORCLIME telah memberikan dukungan dalam memfasilitasi Rapat Koordinasi Pokja PPS. Tak hanya mendukung implementasi program perhutanan sosial di Papua Barat, namun juga mengoordinasikan perkembangan terkini dan mendapatkan dukungan solid dari Mitra Pembangunan. Dalam rapat tersebut, Tim Pokja berhasil memfinalkan matriks program kerja Pokja PPS untuk tahun 2022-2023; matriks ini akan menjadi petunjuk penggerak pelaksanaan program PS di Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. Selain itu, beberapa rumusan penting telah disepakati, termasuk pembentukan Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Papua-Papua Barat, dorongan untuk mendirikan Galeri Perhutanan Sosial di wilayah Manokwari Raya dan Sorong Raya, pencermatan terhadap Peta Indikatif dan Areal PS bersama Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, serta dorongan untuk membangun Pokja PS di tingkat kabupaten/kota.

Melalui peran aktif Pokja PPS, lima *output* utama program telah berhasil ditetapkan. *Output* tersebut mencakup pengembangan kapasitas, penyiapan areal kerja Perhutanan Sosial, penyediaan fasilitas usaha pasca pemberian izin Perhutanan Sosial, pengelolaan galeri untuk produk-produk Perhutanan Sosial, yaitu PESONA MART, dan fungsi kesekretariatan. Pelaksanaan *output* ini telah efektif disebarluaskan melalui empat unit kerja, termasuk Pengembangan Kapasitas, Penyiapan Areal Kerja, Fasilitas Usaha Pasca Izin, serta Pengelolaan Pesona Mart.

Periode September hingga Desember 2022 menjadi penting dalam kerangka perkembangan PS, saat FORCLIME melakukan Identifikasi Kebutuhan Pelatihan (*Training Need Assessment*-TNA) bagi para pendamping PS dan Penyuluh Kehutanan, termasuk anggota Pokja PPS. Fokus utama kegiatan ini adalah di tiga titik utama: Sulawesi Tengah, Papua dan Papua Barat. Dengan hasil TNA ini, sejumlah lembaga seperti Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di daerah, Dinas Kehutanan Provinsi, dan Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, diharapkan dapat merumuskan dan mengembangkan program yang spesifik untuk meningkatkan kapasitas para pendamping PS serta pengurus Pokja PPS di tiga provinsi yang menjadi fokus tersebut. Melalui upaya ini, semakin memperkokoh komitmen bersama dalam peningkatan kualitas Perhutanan Sosial.



Proses FPIC di Kampung Babrongko—Ruben Yogi

PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK TANI HUTAN DI KAMPUNG DUKUNGAN



Memanfaatkan Potensi: Menguatkan Kelompok Tani Hutan di Kampung Binaan

Program FORCLIME merupakan salah satu bantuan teknis yang mendukung implementasi Perhutanan Sosial di kampung binaan. Program ini bekerja sama dengan mitra di daerah untuk memberdayakan kelompok tani hutan (KTH) dan mengembangkan hasil hutan bukan kayu (HHBK) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sambil menjaga kelestarian hutan.



Pelatihan dan Pendampingan

Dalam kerangka implementasi Perhutanan Sosial, FORCLIME telah mendukung berbagai inisiatif penting. KTH mendapatkan pelatihan tentang manajemen usaha, keuangan, dan pembukuan, yang membantu mereka menjadi lebih profesional dalam mengelola usaha mereka. Hasilnya, KTH di Kampung Wasur, kini memiliki buku keuangan dan catatan penjualan yang membantu mereka dalam pengelolaan bisnis.

Selain pelatihan, FORCLIME juga memfasilitasi pertukaran pengetahuan melalui studi banding dan pameran. Contohnya, anggota KTH dari Kampung Yanggandur berhasil memasarkan produk-produk HHBK seperti minyak kemiri setelah berpartisipasi dalam pameran di Jayapura.



Peningkatan Kapasitas melalui Acara Konservasi

FORCLIME juga mendukung KTH untuk berpartisipasi dalam acara Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN). Mereka memamerkan produk HHBK dan berpartisipasi dalam *talkshow*, mendapatkan wawasan berharga dari para ahli konservasi, dan berbagi pengalaman dengan peserta lain yang mengembangkan produk serupa. Ini adalah langkah penting dalam mendukung KTH dalam mengelola hutan secara berkelanjutan.



Pengembangan Produk

Pendampingan FORCLIME tidak hanya berhenti di situ. KTH juga mendapatkan pelatihan tentang pembuatan teh gaharu dan pengemasannya. Produk ini akan melalui uji klinis dan analisis pasar untuk mendapatkan izin penjualan dari BPOM. Ini adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan potensi ekonomi KTH dalam kerangka Perhutanan Sosial.



Pemanfaatan Potensi HHBK

FORCLIME juga mendukung upaya KTH di Kampung Emaus dan Kampung Bikar untuk mengembangkan potensi HHBK di wilayah mereka. Di Kampung Emaus, biji kemiri diolah menjadi produk minyak kemiri dalam kemasan 250ml, yang meningkatkan nilai tambah produk mereka dan mendukung pelaksanaan Perhutanan Sosial. Di Kampung Bikar, fokus diberikan pada optimalisasi produksi minyak lawang, yang merupakan salah satu mata pencaharian utama di sana dalam konteks Perhutanan Sosial.



Pendampingan Bisnis dan Kestinambungan

FORCLIME juga memberikan pelatihan pengembangan wirausaha, membantu kelompok tani dan pendamping KPH di beberapa provinsi untuk mengoptimalkan potensi bisnis mereka dalam konteks Perhutanan Sosial. Dengan pendekatan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip *Free, Prior Informed Consent* (FPIC), program ini menciptakan “local champion” yang mampu memanfaatkan potensi HHBK untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sambil menjaga keberlanjutan hutan dalam kerangka Perhutanan Sosial.



Pertemuan para pihak dalam rangka identifikasi kampung binaan di Kabupaten Tambrau



Pendampingan pelaksanaan program PS dengan pendekatan FPIC, Jayapura



Pelatihan fasilitator untuk di kampung binaan



Pelatihan pembuatan minyak kemiri di Kampung Emaus

LPHD di Distrik Seremuk Kabupaten Sorong Selatan Susun Rencana Kelola Perhutanan Sosial

Dalam rangka mendorong Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) menyusun Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) diadakan seri kegiatan bagi tujuh LPHD di Distrik Seremuk, Kabupaten Sorong Selatan, yaitu survei potensi hutan (10 – 11 Juli 2023) dan lokakarya penyusunan RKPS (12 – 13 Juli 2023) yang diadakan di Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Sorong Selatan di Kampung Haha. Ketujuh LPHD tersebut berada di kampung-kampung: Haha, Wendi, Sira, Manggaroholo, Sasnek, Woloin, Boldon. Seri kegiatan tersebut merupakan kerja sama antara Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanian Provinsi Papua Barat Daya, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Maluku-Papua Seksi Wilayah II, KPHP Sorong Selatan dan GIZ FORCLIME.

Survei potensi hutan dilakukan untuk pengembangan potensi-potensi usaha yang datanya sangat berguna untuk penjangkaran mitra untuk kerja sama usaha. Selain itu, agar LPHD dapat mengetahui dengan jelas batas wilayah kelola/kerja serta mereka dapat memetakan potensi hutan di wilayah mereka masing-masing. Hasil survei potensi ini sangat berguna saat penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial.



Acara lokakarya penyusunan RKPS dibuka oleh Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Maluku Papua, Bapak Ojom Somantri, S.Hut., M.Si., dan dihadiri oleh tujuh LPHD di Distrik Seremuk, Kepala Kampung Haha, Sekretaris Kampung Haha, Bamuskam Kampung Haha, tokoh pemuda dan kelompok perempuan Kampung Haha, Dewan Adat Kampung Haha, dan masyarakat Kampung Haha.

Dokumen final RKPS ini nantinya akan disahkan oleh Kepala LPHD yang bersangkutan, Kepala KPH dan Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Maluku Papua.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

1. **Nita Yohana**, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua Barat
2. **Mohammad Sidiq**, Manajer Bidang Strategis, Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat

Pembekalan Bagi Fasilitator Pelaksana Kegiatan di Kampung-Kampung Dukungan di Tanah Papua

Pada tahun 2022, FORCLIME telah merekrut sembilan fasilitator kampung untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kampung-kampung dukungan, yaitu: Bikar dan Emaus di Kabupaten Tambrau, Haha dan Wendi di Kabupaten Sorong Selatan, Babrongko, Dosai dan Tablasupa di Kabupaten Jayapura, Wasur dan Yanggandur di Kabupaten Merauke.

Tahun ini, FORCLIME melanjutkan program pemberdayaan masyarakat di kampung-kampung tersebut. Beberapa fasilitator kampung adalah orang baru sehingga mereka perlu mendapatkan pembekalan agar memiliki pemahaman yang sama tentang target, kebijakan dan mekanisme kerja FORCLIME khususnya dalam pemberdayaan masyarakat kampung. Pelatihan tersebut dilaksanakan pada tanggal 26 – 27 Juni 2023 secara daring dengan advisor FORCLIME sebagai narasumber. Dalam pelatihan ini juga diundang fasilitator kampung yang telah bergabung pada tahun 2022. Tujuannya adalah agar mereka dapat berbagi pengalaman, selain itu, juga dapat menyegarkan pengetahuan mereka dengan beberapa informasi baru.

Melalui pelatihan ini, para peserta mendapat pengetahuan mengenai: (1) Konsep Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan konsep Perhutanan Sosial (PS); (2) Pengantar pelaksanaan survei data dasar



dengan menggunakan metode pengkajian desa secara partisipatif (*Participatory Rural Appraisal-PRA*); dan (3) Teknik pendampingan kelompok tani hutan khususnya tiga pilar Perhutanan Sosial: Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha.

Pada bulan selanjutnya, para peserta pelatihan ini akan mendapatkan materi tambahan terkait dengan: (1) Pengelolaan Pengetahuan (*Knowledge Management-KM*); (2) Pengenalan Manajemen Risiko (*risk management*); (3) Standar administrasi di GIZ; (4) Penyusunan rencana kerja Juli-Desember 2023.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

1. **Edy Marbyanto**, Strategic Area Manager for Human Capacity Development
2. **Mohammad Sidiq**, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Pemprov Kalimantan Barat Konsultasikan Rencana Proposal Pendanaan Iklim dari *Green Climate Fund* dengan Masyarakat Adat

Konsultasi dan koordinasi dengan para pihak terkait dengan perkembangan pengusulan proposal pendanaan iklim Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama GIZ sebagai Lembaga Akreditasi yang bersumber dari *Green Climate Fund* (GCF) dilakukan baik ditingkat nasional, provinsi dan tingkat kabupaten. Kegiatan konsultasi publik di lima kabupaten terkait proposal tersebut telah dilakukan pada bulan Mei 2023 lalu, yaitu Ketapang, Kubu Raya, Sintang, Sanggau dan Kapuas Hulu.

Untuk kelengkapan proposal, perlu disusun dokumen terkait dengan masyarakat adat yang tinggal di kelima kabupaten tersebut. Oleh karena itu, dilakukan pengumpulan informasi mengenai keterlibatan masyarakat dengan melakukan wawancara terhadap kepala desa atau perwakilan desa setempat, ketua adat, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan adat, dan tokoh pemuda setempat. Pelaksanaan wawancara di kelima kabupaten tersebut diadakan pada 23 Mei sampai 16 Juni 2023, dan dibantu oleh konsultan yang didanai oleh SFF (sumber dana bilateral yang dapat digunakan untuk pemeriksaan dan persiapan tindakan/proyek kerja sama teknis, misalnya GCF Kalimantan Barat). Hasil wawancara



tersebut akan disusun dalam sebuah dokumen Rencana Masyarakat Adat (Indigenous Peoples Plan) yang akan menjadi bagian dari keseluruhan proposal pendanaan iklim dari GCF. Dokumen ini akan berisi peran dan keterlibatan masyarakat adat dalam rencana implementasi proyek, dampak positif dan negatif yang mungkin akan timbul dan dirasakan oleh masyarakat selama jangka periode proyek akan dilaksanakan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

1. Dwi Wahyu Asti, SP, M.Si, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Kalbar
2. Juntani, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Rantai Nilai, Focal Point GCF
3. Wandojo Siswanto, Manajer Strategis untuk Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim

Koordinasi Tingkat Nasional Bahas Usulan Pendanaan Iklim Kalimantan Barat dari *Green Climate Fund*

Dalam rangka mengoordinasikan pengusulan pendanaan iklim oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dari *Green Climate Fund* (GCF), Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai pengusul pendanaan dan GIZ sebagai lembaga akreditasi dari GCF pada 22 Juni 2023 di Jakarta. Dalam pertemuan koordinasi tersebut hadir Sekda Kalimantan Barat; Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK); Direktur BPD LH; perwakilan dari Biro Kerjasama Luar Negeri dan perwakilan dari Biro Perencanaan KLHK. Pertemuan ini bertujuan untuk membangun pemahaman bersama diantara para pihak terkait. Dalam pertemuan ini Wakil Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan, Dr Alue Dohong, menyampaikan sambutan dan memberikan arahan dalam penyaluran pendanaan. Kemudian dilanjutkan dengan arahan dari Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, Dr. Laksmi Dhewanthi, dan presentasi oleh Direktur BPD LH, Dr. Joko Tri Haryanto.



Dalam pertemuan tersebut, Sekda Kalimantan Barat, Dr Harisson, menyampaikan sambutan yang kemudian dilanjutkan dengan presentasi terkait rencana desain kelembagaan dan penyaluran pendanaan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalimantan Barat, Ir. H. Adi Yani, MH. Pada sesi diskusi, Biro Kerjasama Luar Negeri KLHK memberi masukan tentang pentingnya pelibatan lembaga lainnya, termasuk lembaga internasional dalam desain proyek yang dikembangkan, serta pentingnya mengikuti regulasi dan peraturan yang berlaku.

Pertemuan koordinasi ini akan ditindaklanjuti dengan diskusi lebih mendalam terkait dengan desain penyaluran pendanaan dan juga pengaturan kelembagaan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

1. Dwi Wahyu Asti, SP, M.Si, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Kalbar
2. Juntani, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Focal Point GCF Kalbar
3. Wandojo Siswanto, Manajer Strategis untuk Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim

FORCLIME Forests and Climate Change Programme
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Mangala Wanabakti Building, Block VII, 6th Floor
Jln. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270, Indonesia
Tel: +62 (0)21 572 0212, +62 (0)21 572 0214
Fax: +62 (0)21 572 0193
www.forclime.org

FORCLIME Kerja Sama Teknis (TC) adalah program yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan GIZ, dan didanai oleh Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ).

Surel korespondensi: ratu.widyawati@giz.de



Bekerja sama dengan:

